

STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DESA DI KABUPATEN PONOROGO (Studi Penelitian Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal dan Desa Pandak Kecamatan Balong)

Arip Wicaksono¹, Robby Darwis Nasution², Bambang Triono³

1. Ilmu Pemerintahan, aripwicaksono@gmail.com
2. Ilmu Pemerintahan, darwisnasution69@gmail.com
3. Ilmu Pemerintahan, bambangtri635@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the Tourism Potential Development Strategy in Ponorogo Regency with research locations in Kupuk Village, Bungkal District and Pandak Village, Balong District. The background is that the development of tourist villages has begun to show an increase in the Ponorogo Regency area. Along with the community's interest and enthusiasm for rural tourism and tourism village development activities in Ponorogo Regency, it leads to nature tourism. The purpose of this study was to determine the village government's strategy regarding the development of village tourism potential. This study uses a qualitative research with a descriptive approach. In this study, researchers used purposive sampling technique in determining informants. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the tourism village development strategy is conceptualized by every village government which is sustainable and gradual. The concept of the Kupuk Village government is that it leads to an independent village program. While the Pandak village government in the future can realize village tour packages. However, the implementation is still passive because it is still in the early stages, so it is necessary to increase development activities every year. Thus, tourism village development activities in Kupuk Village and Pandak Village can stimulate the community and be able to increase Village Original Opinions.

Keywords : Strategy, Development, Tourism Village

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Strategi Pengembangan Potensi Wisata Di Kabupaten Ponorogo dengan lokasi penelitian di Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal dan Desa Pandak, Kecamatan Balong. Adapun hal yang melatarbelakangi yakni mengingat perkembangan desa wisata mulai menunjukkan peningkatan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Seiring dengan minat dan antusias masyarakat terhadap wisata pedesaan dan aktivitas pengembangan desa wisata di Kabupaten Ponorogo mengarah pada wisata alam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah desa terkait pengembangan potensi wisata desa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini,

peneliti mengguna teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa startegi pengembangan desa wisata dikonsept setiap pemerintah desa yang sifatnya berkelanjutan dan bertahap. Adapun konsep yang dimiliki pemerintah Desa Kupuk yaitu mengarah pada program desa mandiri. Sedangkan pemerintah desa pandak kedepannya dapat mewujudkan paket wisata desa. Akan tetapi pada implementasinya masih pasif karena masih dalam tahap awal, sehingga perlu adanya aktivitas peningkatan pengembangan disetiap tahunnya. Dengan demikian, kegiatan pengembangan desa wisata di Desa Kupuk dan Desa Pandak dapat merangsang masyarakat dan mampu meningkatkan Pendapat Asli Desa.

Kata Kunci : Strategi, Pengembangan, Desa Wisata

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Disetiap daerah di Indonesia memiliki keindahan dan keunikan alam dan budaya yang menakjubkan, sehingga dapat dijadikan karakteristik setiap daerahnya. Dengan kekayaan dan keragaman potensi yang tersedia seharusnya dapat dijadikan modal dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, diantaranya melalui pemberdayaan atau pariwisata yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dikutip dari salah satu program Kementerian Pariwisata melalui Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019 dijelaskan bahwa terdapat 10 destinasi pariwisata prioritas yang akan dikembangkan pada tahun 2016. Dari program tersebut, dapat diketahui arah perkembangan pariwisata nasional mengarah pada wisata alam yang kemudian disusul wisata budaya. Menurut (J, Muljadi A., 2009) gerak perkembangan pariwisata merambah dalam berbagai terminologi diantaranya yakni sustainable tourism development, village tourism, dan ecotourism merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan.

Keberadaan desa sebagai komponen terbawah dari struktur ketatanegaraan di Indonesia memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda mulai dari kondisi bentang alam, sosial, budaya, nilai, norma, dan adat-istiadat disetiap desa. Sebenarnya keunikan yang dimiliki setiap desa sangat potensial untuk modal awal

pembangunan di tingkat desa. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik yang beragam memiliki 21 kecamatan yang terdiri dari 307 desa/kelurahan. (Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2017).

Dewasa ini perkembangan pembangunan ditingkatkan desa mengalami peningkatan, salah satunya melalui pengembangan desa wisata. Perkembangan desa wisata di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang pesat. Hal ini bertujuan untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Mengacu pada data Pengembangan Desa Wisata Kementerian Pariwisata bahwa terdapat 2.000 desa wisata dari 74.954 jumlah desa di Indonesia terdapat. (Ariani, 2017). Sedangkan berdasarkan data (Dinas Pariwisata Ponorogo, 2017) terdapat 70 desa wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Ponorogo. Hal ini turut meningkatkan perkembangan pariwisata di Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Maraknya wisata baru yang bermunculan di Kabupaten Ponorogo turut mempengaruhi minat masyarakat untuk menentukan lokasi wisata yang akan dikunjungi. Salah satunya, animo masyarakat yang tinggi terhadap wisata pedesaan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Saat ini masyarakat lebih antusias saat mengunjungi wisata pedesaan yang berbasis wisata alam. Hal ini dikarenakan kejenuhan dan kepenatan akan rutinitas sehari-hari, sehingga masyarakat membutuhkan sesuatu yang dapat menyegarkan kembali sejenak dengan menikmati kesegaran, keindahan panorama alam dipedesaan yang masih terjaga.

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Ponorogo sendiri masih belum optimal dalam pengelolaannya. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya kepariwisataan bertumpu pada keunikan, kekhasan, dan kelokalan serta keaslian sehingga menempatkan keanekaragaman sebagai suatu hal yang prinsip dan hakiki, maka pengembangan kepariwisataan pada dasarnya untuk kelestarian dan memperkuat jati diri bangsa serta lingkungan alam. (J, Muljadi A., 2009). Sedangkan kenyataan, desa wisata di Kabupaten Ponorogo masih banyak yang meniru wisata dari wilayah lainnya, sehingga belum memiliki keunikaan, dan ciri khas kelokalan yang diangkat. Selain itu diperlukanya perhatian yang lebih terhadap kelestarian alam dan lingkungan guna, menjaga ekosistem yang ada di lokasi wisata.

Mengacu pada Lampiran Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1769/405.29/2017 Tentang Nama-Nama Desa Wisata Sesuai Dengan Potensi Wilayah Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 terdapat 82 wisata alam, 67 wisata religi/budaya dan 15 wisata buatan yang tersebar di 70 desa wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Selain itu berdasarkan program Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo terkait pengembangan desa wisata (bappeda.ponorogo.go.id, 2018) menyampaikan terkait daftar nama desa wisata calon penerima tahun anggaran tahun 2018 didominasi pada pengembangan desa wisata berbasis wisata alam.

Keberadaan aktivitas pengembangan Sendang Beji di Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal menjadi daya tarik wisata tersendiri dalam kegiatan desa wisata. Dengan suasana alam yang masih terjaga, mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke Desa Kupuk. Pengunjung juga dapat menikmati fasilitas umum yang tersedia dilokasi wisata. Tentunya dalam kegiatan pengembangan desa wisata didukung dengan potensi sosial, budaya, dan potensi desa lainnya. Disisi lain antusias masyarakat terhadap kunjungan di Desa Pandak, Kecamatan Balong juga terlihat. Hal ini dikarenakan mereka dapat menikmati keindahan pegunungan, pesona alam dan air terjun yang masih terjaga. Selain itu pengunjung dapat menikmati pemandangan alam dari atas bukit maupun rumah pohon yang tersedia. Kegiatan pembangunan fasilitas umum dilokasi wisata juga dapat dinikmati pengunjung.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya aktifitas sekaligus potensi pembangunan dan pengembangan desa wisata di wilayah Kabupaten Ponorogo perlu ditingkatkan lagi dari setiap tahunnya. Hal ini bertujuan lebih menguatkan potensi lokal yang ada di desa, tentunya dengan program yang terencana, terarah dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka dari itu sangat penting untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa Kupuk Kecamatan Bungkal dan Pemerintah Desa Pandak Kecamatan Balong Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Desa yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Permasalahan dari penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Kupuk Kecamatan Bungkal dan Pemerintah Desa Pandak Kecamatan Balong Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Desa ?”

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal dan Pemerintah Desa Pandak, Kecamatan Balong terkait pengembangan potensi wisata desa.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pihak-pihak terkait, diantaranya yaitu :

1. Pemerintah Desa

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan dalam pengembangan potensi wisata desa sehingga mampu mempercepat pembangunan di tingkat desa.

2. Masyarakat

Dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan tentang strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata desa di Kabupaten Ponorogo. Selain itu dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada masyarakat untuk menentukan lokasi wisata di Kabupaten Ponorogo.

3. Akademisi

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dalam khususnya dalam perkembangan desa wisata di Kabupaten Ponorogo.

B. KERANGKA TEORI

1. Strategi

Menurut George A. Steiner dan John B. Miner strategi ialah pusat dan inti yang khas dari manajemen strategis. Strategi mengacu pada perumusan tugas, tujuan, dan sasaran organisasi, strategi kebijakan dan program pokok untuk mencapainya, dan metode yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa strategi telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan akhir dari organisasi. Kata strategi juga mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Dan sebuah keberhasilan dari strategi biasanya bukanlah keputusan tunggal, tetapi suatu jaringan strategi, substrategi, subsubstrategi, kebijakan dan taktis yang saling berkaitan. (Miner, 1997)

Dalam merancang sebuah strategi menurut (Alwi, 2001) memiliki serangkaian proses formulasi strategi yang juga disebut sebagai perencanaan

strategic yang terdiri dari beberapa kegiatan yang sistematis, diantaranya yakni:

- a. Menetapkan arah strategic organisasi
- b. Mengidentifikasi lingkungan dan analisis SWOT
- c. Merumuskan tujuan-tujuan strategic
- d. Mengembangkan alternatif-alternatif strategic
- e. Memilih strategic

Menurut (Alwi, 2001) tentang upaya pada tahapan implementasi strategi secara umum harus sejalan dengan arah strategiknya (strategic direction) seperti visi, misi, nilai, dan tujuan. Sedangkan untuk mencapai itu, upaya apapun tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan faktor-faktor struktur, SDM, teknologi, sistem, kultur dan sebagainya. Dan sebuah keberhasilan strategi bukan terletak hanya pada konsep strategi, melainkan terletak pada komitmen dan kemampuan setiap orang yang bertanggung jawab menjalankan strategi.

2. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga dijelaskan bahwasanya pemerintah desa ialah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Selanjutnya juga dijelaskan terkait kawasan pedesaan yaitu kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan urusan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dan selanjutnya kewenangan desa meliputi kewenangan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pada hakekatnya pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

3. Pengembangan

Menurut (Sammeng, 2001) menjelaskan bahwa istilah pengembangan mengisyaratkan sebuah proses evolusi dengan konotasi arah yang positif atau sekurangnyamemiliki makna "tidak jalan ditempat". Adanya ketidaksamaan interpretasi terjadi, karena istilah pengembangan dapat dikaitkan dengan dua hal yakni "proses" dan "tingkat" perkembangan sesuatu. Dan pengembangan kepariwisataan di Indonesia mencakup multi dimensi, yaitu meliputi ekonomi, sosial-budaya, politik, dan pelestarian lingkungan (alam dan budaya). Dalam tahapan melakukan pengembangan yang sebaiknya, maka kata kuncinya adalah

- a. Perencanaan yang menyeluruh dan komprehensif,
- b. Pelaksanaan yang hati-hati,
- c. Dan pengendalian yang ketat dan obyektif.

Pada tahap merencanakan pengembangan pariwisata pada semua tingkat (nasional, daerah dan lokal) sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan dan pengelolaan pariwisata. Dalam upaya menyusun rencana pengembangan pariwisata bagi suatu negara atau daerah yang belum berpengalaman merupakan hal yang tidak mudah, maka negara/ daerah yang bersangkutan biasanya harus meminta bantuan dari luar. Maksud bantuan disini bukan hanya tenaga ahli, tetapi juga pembiayaan, karena penyusunan rencana memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijaksanaan dan sasaran pengembangan pariwisata, sehingga diketahui dengan jelas apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya
2. Mengintegrasikan rencana pengembangan pariwisata ke dalam kebijaksanaan dan sasaran yang lebih luas/menyeluruh, sehingga berbagai sektor yang saling terkait dapat berkoordinasi dengan baik.
3. Mengintegrasikan rencana pengembangan pariwisata ke dalam kebijaksanaan dan sasaran yang lebih luas/menyeluruh, sehingga berbagai sektor yang saling terkait dapat berkoordinasi dengan baik.
4. Mengoptimalkan dan menyerasikan Manggar ekonomi, sosial dan lingkungan dari pengembangan pariwisata, dan dalam waktu yang sama meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul.

5. Memberikan gambaran fisik sebagai pedoman bagi suatu daerah mengenai keperluan : penyediaan prasarana, fasilitas dan pelayanan umum, dan Pengembangan objke atau daya tarik wisata.
6. Meletakkan landasan bagi pelaksanaan yang efektif dari kebijaksanaan dan sarana pengembangan pariwisata.
7. Menyediakan pedoman dan standar baku untuk penyusunan rencana lanjutan yang lebih rinci dan pembuatan desain yang sesuai, sehingga terjamin bahwa setiap komponen saling mendukung dan saling memperkuat
8. Menyediakan perangkat untuk melakukan pemantauan secara terus-menerus sehingga kegiatan pengembangan dapat diketahui dan dikendalikan sesuai dengan rencana.

Pendekatan perencanaan untuk pengembangan pariwisata dirasakan sangat penting dan mendesak, karena pembangunan pariwisata tergantung pada daya tarik dan kegiatan yang berkaitan dengan keadaan alam, peninggalan sejarah dan warisan seni budaya. Apabila aset-aset tersebut rusak atau terdegradasi, maka wisatawan tidak akan datang berkunjung dan dengan demikian pembangunan pariwisata tidak akan berhasil dengan baik. Hal itu terjadi, karena wisatawan pada umumnya tertarik berkunjung ke tempat-tempat yang menarik, bersih, terpelihara, dan tidak terpolusi serta tidak kongesti. Pendekatan perencanaan juga penting untuk menjamin bahwa masyarakat setempat tidak terganggu oleh lingkungan yang rusak dan masalahmasalah sosial. Perencanaan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan mempersyaratkan, bahwa segala sesuatu yang termasuk elemen lingkungan haruslah dengan teliti disurvei, dianalisa dan dipertimbangkan sebelum menentukan tipe tempat yang paling sesuai untuk dikembangkan.

Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan, salah satu aspek penting suksesnya pada tahap pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan adalah pembangunan yang berbasis pada masyarakat (community-based development). Untuk pembangunan pariwisata, pendekatan ini memfokuskan pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan jenis pariwisata yang dikembangkan adalah hal-hal yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Implikasinya lebih

lanjut adalah jajaran pemerintah dan swasta di tuntut menerapkan cara-cara yang menjamin bahwa manfaat pengembangan pariwisata akan dinikmati oleh masyarakat setempat dan tidak dikuasai oleh pihak luar. Dengan mengoptimalkan manfaat pengembangan pariwisata kepada masyarakat setempat, maka mereka akan memberikan dukungan dan partisipasi yang kuat, termasuk dalam upaya pelestarian aset-aset yang diperlukan (alam dan budaya). Pengembangan pariwisata yang berhasil pada masyarakat harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh empat pertimbangan utama, yaitu :

1. Aksesibilitas dengan issue pokok (kenyamanan dan keandalan)
2. Pelestarian lingkungan dengan issue pokok (orientasitas dan keramahan)
3. Kemajuan ekonomi dengan issue pokok (manfaat dan siklus bisnis)
4. Pengelolaan yang berkesinambungan dengan issue pokok (tujuan dan metode)

Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan terdapat unsur-unsur pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan pariwisata yang meliputi :

1. Pengesahan rencana

Setelah suatu rencana disahkan, maka sejak itu rencana termaksud secara legal telah menjadi dasar atau pedoman pengembangan pariwisata. Dan sebaliknya jikalau rencana belum disahkan, tidak ada jaminan bahwa rencana itu akan dilaksanakan.

2. Pentahapan program

Pentahapan itu biasanya sudah tercakup dalam struktur rencana yang mencakup berbagai bidang, seperti halnya : pintu gerbang, prasarana, sarana pariwisata, kawasan pariwisata, fasilitas umum dan lain-lain. Dan akan lebih baik apabila dapat dicantumkan pula program lainnya, misalnya program pelestarian lingkungan dan program peningkatan sosial atau yang lainnya.

3. Penerapan zona

Diperlukannya penerapan zona untuk memperjelas kawasan/areal pariwisata yang akan dikembangkan yaitu disebut zona pariwisata. Setelah itu zona pariwisata perlu diperjelas mengenai apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dibangun.

4. Penerapan standar pengembangan

Keberadaan penerapan standar pengembangan berfungsi untuk memberikan pedoman yang menyeluruh, sehingga pengembangan bermutu, ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya warga di sekitar zona pariwisata. Secara administratif pedoman ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah yang bersangkutan dengan memberikan kepastian tentang standar-standar pembangunan yang harus dipenuhi, guna menjamin terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu diperlukannya pedoman mengenai tatacara penyusunan rencana tapak (site plan) dan rencana rinci (detail design & engineering).

Tahapan selanjutnya pembiayaan yang menjadi bagian dari faktor penentu bagi pelaksanaan rencana pembangunan pariwisata. Bagaimanapun hebatnya dan baiknya suatu rencana, tetapi tanpa didukung oleh biaya yang memadai, maka rencana itu tidak akan ada artinya. Oleh sebab itu jenis-jenis keperluan pembiayaan dan sumbernya perlu difahami dan ditemu kenali. Pada dasarnya biaya pengembangan pariwisata di suatu negara/daerah dapat dikelompokkan kedalam empat golongan besar yaitu persiapan, pembangunan prasarana, pembangunan sarana/usaha dan pemantauan.

Kemudian tahap berikutnya yakni pengendalian yang didalamnya tercakup makna pemantauan dan pengawasan haruslah merupakan bagian integral dari rencana dan pelaksanaan pengembangan pariwisata. Pemantauan yang sistematis dan berkesinambungan perlu dilakukan agar secepatnya dapat diketahui apabila terjadi masalah atau penyimpangan. Dengan cepatnya diketahui hal tersebut, pastinya akan dilakukan tindakan penyelesaian atau koreksi yang diperlukan. Dengan demikian bertujuan untuk mengurangi resiko kerugian atau penyimpangan yang lebih besar.

Dalam melakukan pengendalian itu berbagai hal perlu dipantau. Perkembangan pelaksanaan program, khususnya program kerja atau target tahunan harus berkesinambungan. Jumlah kedatangan dan karakteristik wisatawan perlu dicatat untuk mengetahui apakah sasaran (jumlah dan sumber wisatawan) dapat dicapai atau perlu diadakan revisi/penyesuaian. Bila diperlukan, survey khusus harus dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi wisatawan terhadap produk pariwisata. Adapun tugas pemerintah

(pusat atau daerah) dalam mengendalikan pengembangan pariwisata bagi suatu negara/daerah pada dasarnya meliputi berbagai faktor, diantaranya pembangunan, pemasaran, dampak ekonomi, dampak lingkungan (alam dan budaya) dan penegakan hukum.

4. Desa Wisata

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata menjelaskan menjelaskan definisi Desa Wisata sebagai suatu bentuk integrasi yang terdiri dariatraksi, akomodasi, dan fasilitas penunjang yang diberikan dalm sebuah struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang sudah berlaku.

Menurut (Sastrayuda, 2010) terkait prinsip-prinsip pengelolaan desa wisata antara lain, ialah:

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat.
2. Menguntungkan masyarakat setempat
3. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat.
4. Melibatkan masyarakat setempat.
5. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

Sedangkan kriteria yang mendasarinya pada desa wisata menurut (Sastrayuda, 2010) antara lain:

1. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata.
2. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya.
3. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat memperoleh pembagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
4. Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat.

Menurut (Mulyadin, 2001) bahwasanya dalam penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratanpersyaratan, antara lain sebagai berikut :

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan local, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6. Beriklim sejuk atau dingin.
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Menurut gumelar dalam (Supriharjo, 2014) menyebutkan komponenkomponen dalam Desa Wisata diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Keunikan, keaslian, sifat khas
2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa
3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung
4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Menurut (Sastrayuda, 2010) Tujuan pengembangan kawasan desa wisata adalah:

1. Mengenali jenis wisata yang sesuai dan melengkapi gaya hidup yang disukai penduduk setempat.
2. Memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya.
3. Mengupayakan agar masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungannya, dan agar mereka, mendapat jaminan memperoleh bagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
4. Mendorong kewirausahaan masyarakat setempat.
5. Mengembangkan produk wisata desa.

Adapun sasaran desa wisata menurut (Sastrayuda, 2010) yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Tersusunnya pemodelan kawasan desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan / ramah lingkungan.
2. Memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya.
3. Terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga keselamatan pengunjung.
4. Terwujudnya kawasan desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional.
5. Terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya, masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di desa.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan data dalam suatu penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo
- b. Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2004). Metode deskriptif berarti prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Hadari, 1992)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan dua sumber data yakni sumber primer dan sumber data sekunder :

- a. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2017). Adapun sumber data primer yang diperoleh

peneliti melalui wawancara dengan informan yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dan informasi dengan melakukan wawancara dengan informan dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti sebelumnya. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Kupuk, Kepala Desa Pandak, Pj Sekretaris Desa Kupuk, Sekretaris Desa Pandak, dan Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Kupuk dan Pandak.

- b. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2017). Dan sumber sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari bukubuku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, media elektronik dan literature kepusatakaan lainnya. Dan dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dan informasi dengan melakukan observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan kondisi lapangan secara langsung lokasi wisata yaitu di Sendang Tunggul Wulung di Desa Kupuk dan Taman Kelinci/Kedung Lesung di Desa Pandak. Dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini berupa arsip surat penelitian, photo, dokumen Lampiran Keputusan Bupati Ponorogo Tahun 2017 Tentang Nama Desa Wisata Di Wilayah Kabupetan Ponorogo.

Dalam mencari informasi dan data dilokasi penelitian, peneliti menentukan informan diantaranya yakni Kepala Desa sebanyak 2 orang, Sekretaris Desa Sebanyak 2 orang dan Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebanyak 2 orang.

Miles dan Huberman dalam (Moleong, 2004) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam tahapan analisis data model Miles dan Huberman meliputi :

- a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

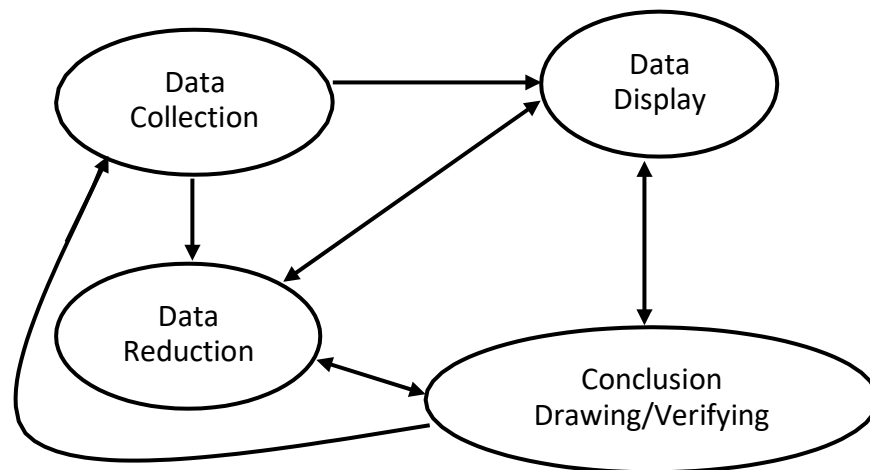
- b. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang paling sering digunakan berupa bentuk teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk teks yang naratif selanjutnya disarankan pada saat melakukan display data juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

c. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai temua baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Gambar 1 Komponen Dalam Analisis Data Model Miles dan Huberman.(Moleong, 2004)



Sumber :(Moleong, 2004)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Geografis Obyek Penelitian

a. Desa Pandak, Kecamatan Balong

Desa Pandak merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Ketinggian kantor Desa Pandak berada di ketinggian 148 meter diatas permukaan laut. Luas kewilayahan Desa Pandak tentunya memiliki batasan-batasan wilayah tertentu, yang mana secara batas administrasi Desa Pandak memiliki batasan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Ngendut & Desa Bulak, Kecamatan Balong

Sebelah Selatan : Desa Janti – Ngiloilo, Kec. Balong

Sebelah Timur : Desa Bulu Kidul, Kecamatan Balong

Sebelah Barat : Desa Tahunan, Kecamatan Tegalombo Pacitan

Wilayah Pemerintah Desa Pandak terbagi menjadi 4 wilayah dukuh/lingkungan (Krajan, Kates, Gundi dan Kresek), 5 Rukun Tetangga, dan 2 Rukun Warga. Selain itu kondisi Desa Pandak memiliki topografi atau bentang lahan yang terbagi atas dua bagian yaitu dataran seluas 156 hektar dan perbukitan/pegunungan seluas 454 hektar. Sedangkan luas wilayah Desa Pandak adalah 610.185

b. Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal

Secara administratif Desa Kupuk menjadi bagian wilayah desa yang ada di Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur. Ketinggian kantor Desa Kupuk berada di ketinggian 120 meter diatas permukaan laut. Desa Kupuk memiliki luas wilayah 502.916 hektar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sambilawang, Kecamatan Bungkal

Sebelah Selatan : Desa Pager, Kecamatan Bungkal

Sebelah Timur : Desa Wringinanom, Kecamatan Bungkal

Sebelah Barat : Desa Bungu dan Desa Padas, Kecamatan Bungkal

Ditinjau berdasarkan keadaan geografisnya, Desa Kupuk dikelilingi aliran sungai dengan daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Wilayah Pemerintah Desa Kupuk terbagi menjadi 5 dukuh/lingkungan, 24 Rukun Tetangga, dan 9 Rukun Warga.

2. Kondisi Demografis Obyek Penelitian

a. Desa Pandak, Kecamatan Balong

Jumlah penduduk Desa Pandak berdasarkan usia Jumlah Penduduk Desa Pandak sampai akhir tahun 2016 adalah dengan rincian terdiri dari:

Penduduk laki-laki : 1.850 jiwa

Penduduk perempuan : 1.800 jiwa

Total jumlah penduduk : 3.650 jiwa

b. Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal

Jumlah Penduduk Desa Kupuk Jumlah Penduduk Desa Kupuk pada tahun 2017 adalah dengan rincian terdiri dari:

Penduduk laki-laki : 1.658 jiwa

Penduduk perempuan : 1.640 jiwa

Total jumlah penduduk : 3.298 jiwa

Total Jumlah Kepala Keluarga: 1.149 KK

Dalam mengumpulkan informasi dan data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan informan, observasi lapangan dan dokumentasi penelitian. Adapun pemilihan informan berdasarkan atas pertimbangan tertentu yang mana berarti informan tersebut mengetahui permasalahan, kondisi seputar desa wisata sebagai topik pembahasan dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan untuk menguatkan data dan informasi tentang Strategi Pengembangan Potensi Wisata Desa di Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal dan Desa Pandak, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dengan begitu informan yang akan di wawancarai dari diantaranya dari pemerintah desa yaitu Kepala Desa Pandak, Sekretaris Desa Pandak, Kepala Desa Kupuk dan Pj Sekretaris Desa Kupuk. Kemudian Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Pandak dan Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Kupuk sebagai pelaksana sekaligus pengelola lokasi wisata.

Berdasarkan pemaparan dari penyajian data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan informan dapat diketahui hasil temuan dalam peneliti ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan

a. Perencanaan yang menyeluruh dan komprehensif

Dengan teridentifikasinya potensi wisata alam yang dimiliki Desa Kupuk dan Desa Pandak sebagai fokus kegiatan pengembangan desa wisata. Selain itu potensi unggulan desa masing-masing juga sudah teridentifikasi sebagai pendukung kegiatan desa wisata. Adapun konsep desa wisata yang ditawarkan Desa Kupuk yaitu mengarah pada pembangunan desa mandiri melalui pengembangan wisata alam dengan didukung potensi sosial, budaya dan masyarakat desa. Sedangkan untuk di Desa Pandak yakni mengarah pada paket wisata desa sebagai daya tarik utama dengan dilengkapi pengembangan potensi kuliner, religi, dan yang lainnya.

Kemudian untuk mempertegas pelaksanaan desa wisata sudah terbentuknya Kelompok Sadar Wisata ditingkat pemerintah desa masing-masing. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah kegiatan

desa wisata agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan. Keberadaan peraturan desa tentang desa wisata (pariwisata) sangatlah penting untuk bahan acuan, pedoman, sehingga mempermudah sekaligus mengatur dalam kegiatan desa wisata. Hal ini juga sudah dilakukan oleh Desa Pandak melalui Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pariwisata. Sedangkan di Desa Kupuk belum ada peraturan desa yang mengatur terkait desa wisata dan sekarang dalam kebijakan BUMDesa.

Disamping itu program yang terencana juga sudah dimiliki desa masing-masing dengan upaya pentahapan pembangunan setiap tahunnya dilokasi wisata. Selain itu program dari pemerintah desa masing-masing turut membantu dan mendukung kegiatan pengembangan dilokasi wisata.

b. Pelaksanaan yang hati-hati

Pelaksanaan desa wisata harus dilakukan dengan mempertimbangkan dari berbagai sudut dan mampu memberikan kemanfaatannya bagi masyarakat, pasalnya sangatlah menentukan citra kepada semua masyarakat dan pengunjung. Untuk mengawali pelaksanaan desa wisata, pengurus Kelompok Sadar Wisata Desa Kupuk dan Desa Pandak dibekali pengetahuan, kompetensi tentang desa wisata atau pariwisata dengan adanya pembinaan, pelatihan, dan study banding melalui kegiatan yang dilaksanakan dari ASIDEWI, pemerintah desa dan pihak lainnya.

Selanjutnya sosialisasi tentang pemahaman akan sadar wisata juga dilakukan oleh pemerintah desa maupun kelompok sadar wisata melalui forum tertentu, kegiatan desa, dan event desa. Kemudian pemerintah desa mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan gotong royong disetiap kegiatan desa wisata. Sedangkan terkait kemitraan yang dilakukan dengan pihak lain juga sudah dilakukan disetiap desa baik dengan dinas atau instansi terkait, komunitas, perguruan tinggi atau sekolah, dan swasta. Kesulitan dalam pembiayaan kegiatan desa wisata menjadi kendala utama dalam kegiatan pengembangan desa wisata.

c. Pengendalian

Pengendalian yang berjalan di desa masing-masing masih belum berjalan dengan optimal. Pasalnya masih ada beberapa pembangunan fasilitas yang cenderung kurang efektif, karena tidak memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Diantaranya yaitu pembangunan spot lapak/ruko, kebersihan dan keamanan. Kemudian kegiatan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan desa wisata dirasa sangatlah perlu dilakukan secara optimal untuk mengetahui sekaligus mengukur keberhasilan dan kekurangan program yang sudah berjalan untuk perbaikan program selanjutnya.

Dan kegiatan promosi yang sudah berjalan perlu ditingkatkan lagi, karena promosi wisata yang dilakukan di desa masing-masing masih kurang optimal. Seharusnya publikasi melalui berbagai media elektronik dan cetak dapat dijadikan promosi wisata. Selain itu keberadaan sosial media dan event desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan promosi desa wisata. Tentunya kegiatan promosi wisata yang dilakukan terorganisir dan terkelola dengan aktif dan baik.

Intensitas koordinasi pemerintah desa dengan kelompok sadar wisata maupun terhadap semua komponen desa perlu ditingkatkan lagi untuk dapat bersinergi dalam rangka mencapai tujuan program desa wisata. Selain itu pelaksanaan peraturan desa terkait desa wisata (pariwisata) harus diimplementasikan selama kegiatan desa wisata. Kemudian pemeliharaan lingkungan, mulai dari kebersihan, keamanan dan kenyamanan lokasi wisata perlu dilakukan agar pengunjung betah menikmati fasilitas lokasi wisata.

Berdasarkan uraian dari indikator pengembangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa untuk kegiatan pengembangan desa wisata di Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal dan Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo masih pasif, hal ini dikarenakan minimnya peningkatan yang dilakukan pemerintah desa. Hal ini dikarenakan pelaksanaan yang sudah berjalan masih berada dalam tahap awal pengembangan desa wisata. Kemudian diperlukannya untuk mempertegas dalam mengatur kegiatan desa wisata melalui kebijakan/peraturan desa tentang desa wisata atau pariwisata. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan

pengembangan kegiatan desa wisata. Kemudian koordinasi yang sudah berjalan dapat ditingkatkan lagi guna memperkuat sinergitas semua komponen dalam kegiatan desa wisata. Dengan kemitraan yang sudah terjalin dengan berbagai pihak, perlu di optimalkan lagi karena masih belum ada kemitraan yang berkelanjutan dalam kegiatan desa wisata

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Program desa wisata merupakan salah satu alternatif sekaligus upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desa. Adapun tujuan dari program desa wisata diantaranya yaitu untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi desa, pengentasan kemiskinan dan lainnya. Tentunya kegiatan pengembangan desa wisata haruslah melibatkan masyarakat dan komponen desa didalamnya sehingga memiliki manfaat yang positif.

Adapun strategi yang dimiliki Pemerintah Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal dalam mengembangkan potensi wisata desa yaitu dengan mengkonsep kegiatan desa wisata mengarah pada program desa mandiri melalui pengembangan potensi Sendang Beji sebagai potensi wisata alam sekaligus daya tarik wisata prioritas. Selain itu juga didukung dengan potensi kesenian, sosial, budaya, dan semua komponen desa. Sedangkan Pemerintah Desa Pandak, Kecamatan Balong melakukan strategi pengembangan potensi wisata desa dengan upaya pengembangan paket wisata desa. Kegiatan tersebut dengan pengembangan wisata Kedung Lesung dan Taman Kelinci sebagai wisata alam sekaligus daya tarik wisata prioritas yang sedang dikembangkan. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan tersebut tentunya didukung dengan potensi kuliner, religi, dan semua elemen masyarakat yang dimiliki Desa Pandak.

Adapun dalam pelaksanaannya masih sangat pasif karena baru tahap awal yakni dengan upaya penggalian dan pengutan potensi desa untuk dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata yang ditawarkan kepada masyarakat. Selain itu juga masih proses pengenalan, sehingga diperlukannya sosialisasi, pemahaman dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan kegiatan desa wisata yang berlangsung masih dalam proses pembelajaran dan memperluas jaringan dengan desa wisata maupun asosiasi (komunitas) atau lembaga pariwisata, hal ini dikarenakan belum memiliki kompetensi, wawasan dan kemampuan tentang kegiatan desa wisata.

Dengan demikian harapan dari adanya kegiatan pengembangan desa wisata yaitu masyarakat setempat dapat terlibat sepenuhnya dalam kegiatan desa wisata. Kemudian keberadaan desa wisata dapat berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Selain itu dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat merangsang kemampuan, inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan produk unggulan desa (souvenir, makanan, barang dan jasa), sehingga mampu meningkatkan kehidupan sosial, budaya dan perekonomian masyarakat.

Dengan hasil lapangan sekaligus kesimpulan yang sudah diuraikan, maka peneliti dapat memberikan saran dalam penelitian ini, diantaranya:

- Bagi Pemerintah Desa, perlunya ditingkatkan lagi koordinasi, komunikasi dan sinergitas antara pemerintah desa dengan kelompok sadar wisata guna mencapai tujuan dari program desa wisata yang sudah terkonsep dan terencana. Dibutuhkannya pengurus yang mengatur perihal parkir, tukang bersih-bersih, keamanan, penjaga wahana dilokasi wisata. Selanjutnya perlunya peningkatan kegiatan pengembangan dilokasi wisata untuk memberikan fasilitas yang menarik, nyaman bagi pengunjung.
- Dan bagi kelompok sadar wisata, dibutuhkannya keaktifan pengurus guna mencapai program desa wisata. Selain itu Kelompok Sadar Wisata mampu menggerakkan masyarakat dan semua komponen desa sehingga dapat mencapai tujuan desa wisata. Perlunya kegiatan event dan promosi wisata yang dilakukan POKDARWIS secara terorganisir dan aktif. Dan memperluas jaringan kemitraan dengan pihak lain yang tidak bersifat profit.

F. DAFTAR PUSTAKA

Alwi, S. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Ariani, V. (2017, September 20).

<http://bumdes.id/wpcontent/uploads/2018/01/Paparan-Pengembangan-Desa-Wisata-Kementerian-Pariwisata.pdf>. Retrieved Juni 5, 2018, from bumdes.id:
<http://bumdes.id/wp-content/uploads/2018/01/Paparan-PengembanganDesa-Wisata-Kementerian-Pariwisata.pdf>

- Bappeda.ponorogo.go.id. (2018, Februari 9). Retrieved Juni 5, 2018, from bappeda.ponorogo.go.id: bappeda.ponorogo.go.id
- Bungin, B. (2010). Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Konomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dinas Pariwisata Ponorogo. (2017). Nama-Nama Desa Wisata Sesuai Dengan Potensi Wilayah Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017. Ponorogo: Dinas Pariwisata Ponorogo.
- Hadari, H. N. (1992). Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- J, Muljadi A. (2009). Kepariwisata dan Perjalanan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Miner, G. A. (1997). Kebijakan dan Strategi Manajemen. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadin, S. P. (2001). Pembangunan Desa Wisata : Pelaksanaan UndangUndang Otonomi Daerah. Info Sosial Ekonomi, Vol. 2 No.1. pp. 37 – 44.
- Pemerintah Desa Kupuk, K. B. (2017). Profil Desa. Kabupaten Ponorogo: Pemerintah Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo.
- Pemerintah Desa Kupuk, K. B. (n.d.). <http://kupuk.desa.id/new/letakgeografis/>. Retrieved from kupuk.desa.id: <http://kupuk.desa.id/new/letakgeografis/>
- Pemerintah Desa Kupuk, K. B. (n.d.). <http://kupuk.desa.id/new/strukturorganisasi/>. Retrieved from kupuk.desa.id: <http://kupuk.desa.id/new/struktur-organisasi/>
- Pemerintah Desa Pandak, K. B. (2017). Profil Desa. Kabupaten Ponorogo: Pemerintah Desa Pandak.
- Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor :PM.26/Um.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata
- Ponorogo, B. P. (2017). Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2017. Ponorogo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo.
- Prasiasa, D. P. (2017, september 30). <http://ojs.stimihandayani.ac.id/index.php/PROSIDING/article/view/232/16> 5.

Retrieved juni 1, 2018, from ojs.stimihandayani.ac.id:
<http://ojs.stimihandayani.ac.id/index.php/PROSIDING/article/view/232/165>

Prayitno, J. (n.d.). bpsdmd.jatengprov.go.id. Retrieved 4 25, 2018, from
jatengprov.go.id:<http://bpsdmd.jatengprov.go.id/v1/sites/default/files/Bahan%20Tayang%20Desa%20Wisata.pdf>

Sammeng, A. M. (2001). Cakrawala Pariwisata. Jakarta: Balai Pustaka.

Sastrayuda, G. S. (2010). file.upi.edu. Retrieved 6 1, 2018, from
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/Lainnya/Gumelar_S/Hand_Out_Matkul_Konsep_Resort_And_Leisure/Pengembangan_Kawasan_Desa_Wisata.pdf

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D). Bandung:
Alfabeta.

Sugiyono. (2017). METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: ALFABETA, cv.

Supriharjo, F. Z. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa
Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Jurnal Teknik Pomits,
Vol. 3, No.2. Issn 2337-3539 (2301-9271 Print).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa